

# **Agenda Keadilan Ekonomi Indonesia Dalam Pemilu 2019**

Tim Penyusun:

**Rachmi Hertanti**, Direktur Eksekutif IGJ

**Olisias Gultom**, Peneliti Senior IGJ

**Rahmat Maulana Sidik**, Koordinator Isu Pangan IGJ

**Muhamad Teguh Maulana**, Koordinator Isu Kesehatan & Buruh IGJ

*“Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara structural bagi Indonesia dengan mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat”*

**Jakarta, 31 Januari 2019.** Kinerja perdagangan di tahun 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang 5 tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai factor khususnya tekanan perekonomian global. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai penurunan kinerja perdagangan Indonesia di sepanjang 2018 bukan sekedar persoalan kasuistis yang dipengaruhi oleh kondisi global semata, tetapi ini juga merupakan efek jangka panjang dari kebijakan salah kelola perekonomian nasional dimana Pemerintah Indonesia tidak mampu menyusun strategi penguatan ekonomi nasional atas dampak dari kebijakan ekonomi terbuka.

Persoalan yang melingkupi kebijakan perdagangan Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia paska tahun 1967, dimana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam. Oleh karena itu, apa yang dihadapi oleh Indonesia hari ini merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neo-liberal yang terus dipertahankan Pemerintah Indonesia sejak jaman orde baru, reformasi, hingga rezim jokowi saat ini.

Pergantian pemimpin dalam proses demokrasi yang berlangsung lewat Pemilu 2019 nanti, seharusnya bukan proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki. Untuk itu, Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara structural bagi Indonesia dengan mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, IGJ mendesak dua (2) agenda keadilan ekonomi Indonesia yang harus menjadi bagian dalam perdebatan arah bangsa, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia, yaitu:

## **1. Arah Kebijakan Perdagangan Indonesia**

### ***Hapus Ketergantungan Pada Komoditas Ekstraktif***

IGJ mendesak agar agenda diplomasi perdagangan Indonesia yang berbasis komoditas bahan mentah harus segera dibatasi atau bahkan ditinggalkan dan diperkuat dengan kinerja perdagangan yang bernilai tambah. Jika strategi ini dipertahankan, dapat dipastikan jika Indonesia tidak akan naik kelas dan menjadi pemain besar dalam agenda *Global Value Chains*.

Hingga saat ini, kontribusi komoditas ekstraktif pada perdagangan Indonesia masih didominasi oleh Batubara dan Sawit yang masing-masing adalah 15,12% dan 12,51%, yang kemudian disusul sektor besi-baja dan logam masing-masing 3,54% dan 3,23% dari total ekspor. Sehingga,

ditengah tantangan global hari ini, Indonesia akan kesulitan meningkatkan ekspornya dengan bergantung pada komoditas ekstraktif.

Fakta menunjukkan bahwa ketergantungan perdagangan pada komoditas ekstraktif tidak berdampak terhadap daya saing Indonesia di level global, dan sangat rentan terhadap fluktuatif harga komoditas global. Bahkan ketergantungan ini pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membangun industri lokal, yang menyebabkan kebutuhan domestic bergantung pada produk impor. Kondisi inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup rentan. Terbukti pelemahan rupiah di tahun 2018 tidak mampu digunakan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, tetapi justru semakin membuat ekonomi nasional terpuruk akibat defisit transaksi berjalan yang terjadi di sepanjang kuartal II dan III 2018.

Indonesia terus menghadapi fenomena deindustrialisasi akibatnya daya saing yang rendah, dan seiring kontribusi sektor industri manufaktur yang terus menurun terhadap PDB. Hal ini sekaligus menunjukkan belum optimalnya sumber daya yang dimiliki untuk proses penciptaan nilai tambah (industri) dan perluasan lapangan kerja. Dalam periode hampir 15 tahun (2001-2015), sektor industri hanya dapat menyerap sebesar 1% tenaga kerja yaitu dari 13% ke 14%. Bahkan, pergeseran kontribusi sektor pertanian oleh sektor industri tidak disertai pegeseran penyerapan kerja yang sepadan dan hal tersebut menimbulkan banyak persoalan pembangunan.

Akibat dari pemusatan kinerja perdagangan Indonesia pada komoditas mentah, khususnya sawit dan batubara, juga berdampak terhadap memburuknya praktek monopoli di sektor ini dan semakin mengakumulasi kerugian yang diderita oleh masyarakat. Paling tidak ada 2 kerugian besar yang diderita masyarakat dari praktek monopoli di 2 sektor ini, yaitu pelanggaran pajak dan pelanggaran HAM (dalam konteks kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan).

Tax ratio di kedua sektor ini lebih rendah dibandingkan sektor lain. Tax ratio di sektor pertanian hanya sebesar 1,16% dan sektor pertambangan sebesar 9,45%. Kondisi ini, memberikan sinyal masih banyak persoalan ketidakpatuhan WP di kedua sektor ini di Indonesia. KPK menemukan masih banyak perusahaan – perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Misalnya saja, dari data hasil Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang di data oleh DJP, sebesar 24% tidak memiliki NPWP, serta ada sekitar 35% yang tidak melaporkan SPT<sup>1</sup>.

Ada sekitar 6 juta hektar lahan pertambangan yang berada di kawasan hutan konservasi dan lindung yang mengganggu stabilitas lingkungan hidup. Dan sekitar 4.276 IUP yang non CnC baik dari sisi administrasi, peruntukan lahan yang menyebabkan tumpang tindih lahan, kewajiban pembayaran royalty dan iuran tetap. Bahkan, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh korporasi bila dijumlahkan maka total lahan yang sebenarnya dikelola oleh korporasi baik lahan inti ditambah lahan plasma mencapai 8,4 juta hektar atau setara dengan 95% dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanam di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Saputra, Wiko (2015). Estimasi Aliran Uang Ilegal dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan di Indonesia. PWYP Policy Review, Nomor 1/Oktobre 2015.

<sup>2</sup> Pengertian luas lahan yang di kelola korporasi adalah luas lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang dikelola melalui PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

### ***E-commerce: "Indonesia Bukan Hanya Pasar"***

Nilai dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menjadi yang paling menonjol di ASEAN dan bahkan di dunia. Tetapi potensi dan peluang ini tetap saja rentan menjadi tidak optimal bila tidak disikapi secara bijaksana dan hati-hati bagi pembangunan Indonesia ke depan. Nilai ekonomi digital Indonesia tersebut mencapai 27 miliar dollar, tertinggi di ASEAN dengan 44% (12,2 miliar dollar), di sisi lain kontribusi *e commerce* terhadap PDB baru sebesar 2,9 %.

Satu catatan menonjol lain pada tahun 2018 adalah meningkatnya angka transaksi *market place* asal Indonesia dan berada pada peringkat teratas dibandingkan toko online yang selama ini cenderung mendominasi pasar online. Toko online yang mendominasi pasar online selama ini adalah toko online yang berbasis di luar negeri dan menjual barang-barang impor. Sementara *market place* adalah pasar online yang umumnya merupakan ruang terbuka bagi pelaku dalam negeri khususnya berbasis UMKM.

Hal ini terjadi tidak terlepas akibat suntikan dana dari investor besar asing yang juga adalah pelaku bisnis serupa internasional atau merupakan kelompok investor yang selama ini berada dibalik-*start up* besar dunia lainnya. Kedua, dampak adanya pelaku bisnis besar dunia dibalik pendanaan bisnis online di Indonesia memberi dampak semakin banyak atau dominannya produk-produk impor pada barang dan jasa yang ditawarkan melalui *start up-start up* tersebut.

Konsekuensi atas kondisi ini adalah akan semakin ketatnya produk-produk lokal, khususnya produk yang berbasis UMKM Indonesia, bersaing dengan produk-produk impor ditengah persaingan global dalam frame dominasi kapital besar internasional. *Market place* yang sebelumnya menjadi harapan bagi produk dan industri lokal akan semakin sulit dimanfaatkan, sebaliknya justru menjadi media penetrasi bagi produk-produk impor untuk bisa mengakses market Indonesia tanpa batas ruang dan waktu.

Untuk itu, agar Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pasar, perlu ada strategi yang tepat untuk mendukung Penguatan UMKM di daerah, khususnya industri kecil dan menengah berbasis desa selayaknya melalui pemanfaatan teknologi digital ini. Terkoneksinya seluruh wilayah Indonesia menjadi harapan bagi terbukanya peluang bagi pelaku industri Indonesia, khususnya industri UMKM bisa mengembangkan diri dan memerikan peran dan kontribusinya bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

Penyiapan sarana pendukung di daerah seperti kemampuan logistik yang memadai, penyiapan server berbasis kabupaten/kota juga harus bisa dilakukan secara parerarel bersamaan dengan pembangunan jaringan *broadband* nasional yang hampir selesai dilakukan oleh pemerintah pusat. Kesiapan ini menjadi mendesak mengingat keterlambatan atas kesiapan tersebut, pada akhirnya hanya akan memberi dampak yang jauh lebih menguntungkan bagi masuknya barang-barang impor ke desa-desa di Indonesia dan mempersulit perkembangan perekonomian berbasis rakyat di daerah-daerah.

### ***Harga Mati Dalam Diplomasi Perdagangan Indonesia***

Menguatnya praktek proteksionisme dalam perdagangan global harus dijadikan Indonesia sebagai momentum untuk mengukur kembali kekuatan perdagangan Indonesia. Pilihan strategi diplomasi perdagangan internasional Indonesia sudah seharusnya diarahkan untuk memperkuat dan melindungi kedaulatan ekonomi rakyat.

Untuk menjadikan Indonesia berdaulat dalam skema perdagangan global hari ini, satu-satunya strategi yang tepat adalah dengan industrialisasi. Saatnya melakukan Substitusi Impor dan memperkuat produk lokal dalam seluruh kegiatan perekonomian nasional. IGJ berpandangan,

bahwa industrialisasi tidak harus melulu bergantung pada investasi asing. Tetapi untuk memperkuat sektor riil, Pemerintah harus juga memfokuskan industrialisasi berbasis produksi rakyat yang menjadi aktor utama dari sebuah proses rantai pasok produksi dari hulu hingga hilir, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

Keberhasilan agenda ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah Indonesia melaksanakan agenda industrialisasi berbasis produksi rakyat, khususnya dalam membangun infant industry, melalui penerapan beberapa kebijakan yang mendukung berkembangnya produksi dalam negeri dan penyerapannya, seperti penerapan kewajiban Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pembatasan impor untuk substitusi produk impor, dan pembatasan ekspor komoditas mentah, termasuk transfer kekayaan intelektual. Oleh Karena itu, menjadi penting membawa kebijakan ini sebagai posisi runding Indonesia yang tidak bisa ditawar dalam perundingan perjanjian perdagangan dan investasi internasional.

Selain itu, perlindungan pertanian dan sektor pangan lainnya di Indonesia dalam agenda perdagangan global harus menjadi prioritas. Ketidak-adilan perdagangan global di sektor ini terus terjadi, dan berdampak terhadap matinya produsen pangan lokal di Indonesia. Oleh karena itu, merespon perkembangan proteksionisme global hari ini, Indonesia harus mengatakan “TIDAK” pada agenda Reformasi WTO yang didorong oleh AS, EU, dan Jepang. Kepentingan perlindungan pertanian Indonesia harus menjadi harga mati dalam perundingan.

## **2. Perlindungan Kepentingan Rakyat Dalam Perjanjian Perdagangan & Investasi Internasional**

Di tahun 2018 ada beberapa Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan akan segera diratifikasi, yaitu: Indonesia-EFTA (kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Swiss, Norwegia, Islandia dan Liechtenstein); 10th ASEAN Framework Agreement on Service, First Protocol to Amend ATIGA, ASEAN Agreement on Electronic Commerce, dan Indonesia-Australia CEPA.

Perkembangan Model kerjasama comprehensive perdagangan internasional bukan lagi hanya sekedar mengatur kerjasama perdagangan secara sempit (ekspor-impor), tetapi juga mengatur aspek ekonomi dan social secara luas dan berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat Indonesia, bahkan kedaulatan Negara ikut dipertaruhkan didalamnya.

Oleh karena itu, dampak Perjanjian FTA tidak dapat hanya dilihat dari sekedar urusan defisit perdagangan Indonesia saja. Melainkan, ia harus dilihat dari berbagai aspek seperti kemiskinan, sosial, dan hak asasi manusia. Hal ini karena beberapa aturan di dalam FTA menyangkut hak dasar publik seperti kesehatan, pangan, pendidikan, dan lingkungan.

Perjanjian FTA menggingingkan adanya peran negara yang minim dalam perekonomian, sehingga ketentuan FTA akan membatasi peran negara melalui desakan liberalisasi ekonomi diseluruh sektor ekonomi dan kehidupan rakyat. Tentunya menjadi sangat penting sebelum memberikan persetujuan untuk meratifikasi perjanjian perdagangan bebas, DPR RI harus menghitung dampak jangka panjangnya bagi kepentingan rakyat luas.

### ***Tanggung Jawab DPR RI Dalam Isu Strategis FTA***

IGJ mendesak kepada DPR RI harus menjadikan proses ratifikasi sebuah perjanjian perdagangan bebas dan investasi sebagai isu strategis negara dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Sehingga, tidak lagi proses ratifikasi perjanjian FTA hanya sebagai proses

sekedar pemberian stempel DPR. Peran strategis DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap ratifikasi perjanjian FTA menjadi hal yang penting dalam mengontrol kekuasaan eksekutif demi melindungi kedaulatan rakyat.

DPR RI harus melakukan analisis penilaian dampak FTA dalam jangka waktu yang panjang baik terhadap ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia sebelum Indonesia melakukan ratifikasi FTA. Hal ini penting guna memastikan adanya perlindungan hak dasar publik yang wajib disediakan oleh Negara dan tidak dijadikan sebagai komoditas dagang.

Pasca Putusan MK terhadap Perkara No. 13/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-undang Dasar 1945, peran DPR RI semakin menguat dalam rangka melakukan kontrol terhadap kekuasaan lembaga eksekutif terkait dengan pembuatan perjanjian internasional, khususnya perdagangan dan investasi internasional. Beberapa kewenangan DPR RI yang menguat paska putusan MK, dan IGJ mendesak agar DPR RI segera melakukan tindak lanjut atas putusan tersebut, yaitu:

1. Perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, Majelis hakim menilai bahwa hal itu tidak dapat ditentukan secara limitative dan mengharuskan adanya persetujuan DPR RI.
2. DPR RI harus memastikan bahwa keterlibatan negara dalam perjanjian internasional dengan dalih ketertiban dunia tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.
3. DPR RI harus segera mendorong pembahasan revisi UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan mengacu pada isi putusan MK.
4. DPR RI dapat mendorong dan/atau melakukan review kembali terhadap perjanjian internasional terhadap seluruh perjanjian internasional, khususnya terhadap perjanjian perdagangan, investasi, dan utang luar negeri, untuk memenuhi unsur keadilan sosial dan selaras dengan amanat Konstitusi.

Dengan kewenangan tersebut diatas, maka IGJ berpandangan bahwa Pemilihan Legislatif harus menghasilkan anggota legislative yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang baik dalam memahami permasalahan negara, khususnya terkait dengan perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Sehingga, proses pemilu 2019 bukan hanya sekedar menjual profil caleg-caleg yang dapat mendulang suara rakyat hanya untuk memenangkan partai.

\*\*\*\*\*

***Indonesia for Global Justice(IGJ)***

Komplek PLN, Jl.Laboratorium No.7, Duren Tiga

Pancoran, Jakarta Selatan 12760

Telp: +62-21-7984552

Email: [igj@igi.or.id](mailto:igj@igi.or.id) atau [keadilan.global@gmail.com](mailto:keadilan.global@gmail.com)